

Manajemen Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara

Sunardi¹, Gunawan², Makmur Kambolong³ Usman M⁴

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo

email : ardifisip45@gmail.com

Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program mitigasi kebutuhan berbasis sosial dan finansial untuk individu bergaji rendah (MBR) untuk mendukung dan meningkatkan kepercayaan pada sifat rumah dan pengembangan rumah baru di samping kantor terbuka, kerangka kerja dan utilitas. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Abeli Kota Kendari yang dilakukan oleh Satker Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat bahwa: (1.) Perencanaan program BSPS dilakukan Kementerian PUPR sementara itu Satker Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana. (2). Pengorganisasian pada Satker Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan cukup baik, petugas dibawah akan selalu melapor kepada atasannya baik dalam bentuk laporan ataupun rekomendasi. (3). Penggerakan yaitu dengan dua tahap pertama tahap pelaksanaan program BSPS yang meliputi penetapan penerima bantuan, pencairan dana, penggunaan dana dan pemanfaatan rumah, tahap kedua pengarahan pada tujuan yakni program BSPS untuk menumbuhkan rumah layak huni. (4). Pengawasan atau pengendalian dilakukan dengan dua tahap yakni Mengamati dan menilai berarti menjamin pelaksanaan latihan sesuai pengaturan dan memutuskan kecepatan pencapaian latihan dan memberikan proposal untuk perbaikan pelaksanaan di masa depan. Kata kunci: Manajemen, Program BSPS

Kata kunci : Manajemen, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan Rumah Layak Huni.

ABSTRACT

Self-improvement Lodging Energizer Help (BSPS) is a socially and financially based neediness mitigation program for low-pay individuals (MBR) to support and increment confidence like houses and the development of new houses alongside open offices, framework, and utilities. This study aims to determine the management of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Abeli District, Kendari City conducted by the Southeast Sulawesi Housing Provision Task Force. This research method is descriptive with qualitative data analysis, which is a problem-solving procedure that is investigated by describing or describing the state of the object of research at present, based on facts that appear or as they are. (1.) The planning of the BSPS program is carried out by the Ministry of PUPR while the Southeast Sulawesi Housing Provision Task Force is the implementer. (2). The organization of the Southeast Sulawesi Housing Provision Task Force has gone quite well, the officers below will always report to their superiors either in the form of reports or recommendations. (3). Mobilization, namely with

the first two stages of the implementation phase of the BSPS program which includes the determination of beneficiaries, disbursement of funds, use of funds and utilization of houses, the second stage of direction on the objectives of the BSPS program to grow habitable houses. (4). Supervision or control is carried out in two stages, Observing and assessment means to guarantee the execution of exercises as per the arrangement decide the achievement pace of accomplishing exercises, and give proposals for future execution improvement.

Keywords: Management, Self-Help Housing Stimulant Assistance, and Decent Housing.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menimbang: Huruf (a), Masuk akal bahwa setiap orang memiliki pilihan untuk melanjutkan kehidupan yang makmur secara seolah-olah dan intelektual, untuk tinggal, dan untuk mendapatkan iklim hidup yang layak dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, Tiga pihak yang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 Ayat (4) Huruf (a) Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Munculnya *ghetto* dan peningkatan cepat populasi metropolitan, baik secara normal atau karena relokasi, adalah perkembangan individu dari kota ke daerah perkotaan. Keadaan penduduk dengan peningkatan penghuni kota yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pemukiman dan jumlah rumah yang layak huni, menyebabkan banyak pertumbuhan di rumah liar dan *ghetto*, baik mengenai sifat daerah, sifat persiapan ruang, atau kesadaran penghuninya.

Secara etimologis, kata dewan berasal dari bahasa Inggris, khususnya para eksekutif, yang diciptakan dari kata *to make due*, dan itu berarti mengawasi atau membuat jatuh tempo. Kata mengawasi sendiri berasal dari bahasa Italia *maneggio*, yang diambil dari bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata manus, dan itu menyiratkan tangan (Samsudin, 2006) Sementara dalam kata-kata ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh banyak spesialis. Para eksekutif menurut G.R. Terry adalah interaksi reguler, yang terdiri dari mengatur, memilah, merencanakan dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan SDM dan sumber daya lainnya (W.Griffin, 2020) Manajemen adalah ilmu dan juga keahlian untuk membuat orang lain bersedia atau siap untuk mencoba mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, dengan cara ini para eksekutif membutuhkan ide-ide penting, seperti informasi, kemampuan untuk membedah keadaan, kondisi, SDM yang ada dan mempertimbangkan metode yang tepat untuk melakukan kegiatan

yang sama-sama terkait dengan pencapaian tujuan. (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014)

Manajemen adalah ilmu dan juga keahlian untuk membuat orang lain bersedia atau siap untuk mencoba mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, dengan cara ini para eksekutif membutuhkan ide-ide penting, seperti informasi, kemampuan untuk membedah keadaan, kondisi, SDM yang ada dan mempertimbangkan metode yang tepat untuk melakukan kegiatan yang sama-sama terkait dengan pencapaian tujuan. (Budiman, 2000) Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan serta mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling) (Kristanti et al., 2023) Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses mengintegrasikan atau menyatukan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. (Salusu, 1996) Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha oleh para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Salusu, 1996)

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan pengelolaan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan serta mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukungnya dalam hal untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien.

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi ‘sebagian orang tersingkir’ dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 2000)

Adapun beberapa pengertian pembangunan menurut para ahli, dalam (Muhammad, 2017):

Todaro (2011;16) : Pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan yang memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan dalam memilih selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan. Ginanjar Kartasmista (1994): Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Siagian (1994) : Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta sarana, prasarana dan utilitas umum. Adapun kategori dari penilaian masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang penghasilannya dibawa Upah Minimum Provinsinya (UMP) masing-masing. Program ini merupakan program dari kementrian Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Permen PUPR No 13 tahun 2016).

Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara tentu menjadi daya tarik tersendiri alhasil banyak pendatang dari kabupaten atau kota lain di Sulawesi Tenggara yang memilih untuk berkeja dan mencari penghidupan di Kota Kendari hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kawasan-kawasan kumuh di beberapa titik Kota Kendari adapun faktor lainnya yaitu kemiskinan sehingga tidak mampu membeli sebidang tanah di lahan yang layak yang membuat mereka terpaksa tinggal di pinggir kali, pinggir teluk hingga dibalik gedung-gedung besar dan tinggi. Data terakhir yang didapat yaitu pada akhir tahun 2021 kawasan kumuh di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih mencapai 626,4 hektar yang tersebar di beberapa kelurahan . (Clarity, 24 November 2021) Dalam SK Walikota Kendari No. 1017 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Kendari. Kecamatan Abeli yang meliputi kelurahan, Abeli, Anggalomelai,

Benua Nirae, Bungkutoko, Lapulu, Puday, Nambo, Petoaha, Poasia, Sambuli, Talia, Tobimeta, dan Tondonggeu masuk dalam kategori kumuh dengan status kumuh ringan.

Berdasarkan observasi awal pada bulan Mei 2023, sebagian besar masyarakat pada Kecamatan Abeli menjadikan wilayah persisir sebagai kawasan permukiman. Sehingga menjadi tempat tumbuhnya permukiman kumuh. Berdasarkan hasil verifikasi yang tertulis dalam dokumen *Land Acquestion And Resettlement Action Plan* (LARAP) Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari menunjukkan Bahwa ada kawasan tepi pantai yang dilibatkan oleh daerah setempat sebagai tempat tinggal dengan persetujuan lisan dari lingkungan kelurahan dengan praktis tidak ada data tersusun dari kelurahan. Kantor kerangka dasar yang kurang, seperti rembesan yang belum memenuhi persyaratan teknis dan batas rembesan yang tidak mencukupi karena perendaman saat air pasang Masalah lain yang juga menyebabkan ghetto adalah air limbah para eksekutif, masalah pemborosan laut, jaminan kebakaran dan manfaat air minum yang juga kurang maka dari itu diperlukan adanya rencana penataan dan pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh terkhususnya di Kecamatan Abeli, jelas ini penting bagi tanggung jawab otoritas publik atas situasi ini Unit Kerja Pengaturan Penginapan Sulawesi Tenggara. Mengingat dasar masalah ini, ini, kemudian, pada saat itu, mendasari pencipta untuk mencari tahu lebih banyak, Manajemen Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Abeli Kota Kendari (Studi Pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasari alasan masih terdapatnya permukiman dan kawasan perumahan yang belum tertata dengan baik serta masih kurangnya infrastruktur dasar Kota sehingga mengakibatkan munculnya permukiman kumuh di Kecamatan Abeli. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposives sampling yaitu menetapkan informan dengan tehnik acak berdasarkan homogenitas informan dan menurut kriteria tertentu. Informan penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari Tenaga Ahli Manajemen, Tenaga Fasilitator Lapangan dan 2 orang Penerima Bantuan BSPS di Kecamatan Abeli. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan

sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan (*Planning*)

Ada dua tahap dalam ide penyusunan program BSPS yang dilakukan oleh Unit Penataan Penginapan Sulawesi Tenggara Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Tenaga Ahli Manajemen Muhammad Mukhlis menyatakan bahwa:

“Dalam Tahap perencanaan itu ada dua yang pertama tahap penyiapan kegiatan dan yang kedua tahap penyiapan masyarakat kedua tahap ini sangat penting dalam menunjang terlaksananya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya”. (28 Agustus 2023)

Berikut penjelasan mengenai kedua tahap dalam perencanaan yang dilakukan oleh Satker Penyedia Perumahan Sulawesi Tenggara dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1. Tahap Persiapan Kegiatan

Sebelum dimulainya proses pembangunan BPS terdahulu dilakukan pengusulan dan penetapan lokasi yang mengusulkan adalah kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada Gubernur Penetapan lokasi ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi/penilaian dengan berfokus pada usulan atau saran dari dinas/lembaga negara yang lebih tinggi dan dalam hal terjadi penyesuaian wilayah, usulan tersebut akan disampaikan oleh Pejabat/Ketua Kota kepada Direktorat Jenderal Pengaturan Penginapan setelah memutuskan daerah, kemudian pengembangan kelompok pelaksana menunjuk ke arah menjalankan program BPS.

2. Tahap Penyiapan Masyarakat

Perencanaan masyarakat dilakukan untuk memungkinkan penerima yang akan datang siap untuk melaksanakan program Penguatan yang dilakukan dengan bantuan TFL dan manajemen berlapis oleh Korkab, *Check Group*, dan PPK dibantu oleh *Commonplace Specialists*. Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad Mukhlis selaku Tenaga Ahli Manajemen Beliau menyatakan bahwa:

“saat ini dalam hal perencanaan kami belum pernah menemukan masalah yang begitu serius yang kemudian membuat terganggunya pelaksanaan program BPS walaupun kadang ada beberapa masalah kecil dikarenakan petunjuk teknisnya yang menggabungkan secara umum tentu harus dijabarkan kembali oleh kami di Satker ini, apalagi dengan menghadapi kenyataan masyarakat di lapangan yang memiliki pemikiran yang berbeda beda tentu itu

harus dilakukand dengan perencanaan yang matang sebelum terjun kelapangan”. (28 Agustus 2023)

Perecana program BSPS adalah Kementrian PUPR dalam hal ini Ditjen Perumahan yang kemudian dijabarkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS sementara itu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara yakni sebagai Pelaksana, pengawas, pendamping serta koordinator antara Balai P2P Sulawesi III dan Pemerintahan Provinsi hingga Kelurahan/Desa di Sulawesi Tenggara.

B. Pengorganisasian (*Oranizing*)

Dimensi Pengorganisasian dalam upaya mengetahui manajemen pada kantor Satuan Kerja Penyediaan perumahan Sulawesi Tenggara dapat dikur berdasarkan:

1. Otoritas (*Authority*)

Kepala Satker Penyediaan Perumahan Sultra telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang Pimpinan yang mana ia menggunakan kewenangan atau otoritas untuk mengarahkan dan memutuskan demi tercapainya tujuan organisasi.

2. Spesialisasi Kerja

Spesialisasi atau pembagian kerja pada Satker Penyediaan Perumahan Sultra telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Perumahan dan klasifikasi perekrutanya di lakukan oleh Kepala Balai Sulawesi III dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

3. Rantai Komando

Pengorganisasian yang terjadi pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan cukup baik yang mana petugas dibawah akan selalu melapor kepada atasnya baik dalam bentuk laporan ataupun rekomendasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Manajemen beliau menyatakan bahwa:

“saya sebagai Tenaga Ahli Manajemen akan melapor pada PPK bilah ada beberapa kesalahan atau rekomendasi dalam pelaksanaan program BSPS kemudian PPK diberikan Arahan oleh Kepala Satker dalam melakukan tugasnya sedangkan Kepala Satker berkerja sesuai dari paerinta Kepala Balai Sulawesi III yang ada Di Makasar” (28 Agustus 2023).

Dimensi pengorganisasian yang terjadi pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan cukup baik yang mana petugas dibawah akan selalu melapor kepada atasnya baik dalam bentuk laporan ataupun rekomendasi,

C. Penggerakan (*Actuating*)

Dimensi Penggerakan dalam upaya untuk mengeahui manajemen Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara dapat dukur berdasarkan:

1. Pelaksanaan Program BSPS

Tahap pelaksanaan meliputi penentuan penerima, pengeluaran dan pengangkutan aset, pemanfaatan aset dan penggunaan rumah. pelaksanaan program BSPS sangat kompleks dan teratur yang mana dalam pelaksanaanya mengacu pada ketentuan pedoman teknis yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan.

Tabel 1. Daftar Penerima BSPS Pada Kecamatan Abeli Tahun Anggaran 2023

No	Kelurahan	Jumlah
1	Abeli	4
2	Anggalomelai	5
3	Anggalomelai	16
4	Benuanirai	23
5	Total	48

Sumber: Kantor Satker Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara

2. Pengarahan Pada Tujuan

Dimensi pengarahan pada tujuan sudah berjalan dengan cukup baik yang mana masing-masing petugas pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara selalu bertugas dan berpatokan pada tujuan organisasi ini diperkuat dengan pernyataan dari sala satu penerima bantuan BSPS yang merasa sudah terbantu dalam pendirian rumahnya sehingga menjadikan rumah layak huni. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tenaga Ahli Manajemen Muhammad Mukhlis beliau menyatakn bahwa:

“untuk saat ini belum ada kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya palingan hanya beberapa saja mis komunikasi antara kami dalam hal ini Tenaga Fasilitator Lapangan dengan masyarakat penerima bantuan tapi kita maklumi saja soalnya ini kita urus orang banyak yang berbeda-beda pemikiran”. (28 Agustus 2023).

Dimensi Penggerakan sudah berjalan dengan cukup baik. Baik pada tahap pelaksanaan program BSPS hingga tahap pengarahan pada tujuan dalam pelaksanaanya Satker Penyediaan Perumahan Sultra selelu bebrpatokan pada pedoman teknis yang tekah di tetapkan oleh Dirjen Perumahan sedangkan dalam aspek pengarahan pada tujuan dapat

dibuktikan dengan penerima bantuan yang sangat merasakan kebermanfaatan dari program BSPS tersebut.

D. Pengawasan (*Controlling*)

Dimensi Pengawasan dalam upaya untuk mengeahui manajemen Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara dapat dukur berdasarkan

1. Pemantauan

Tujuan pengamatan adalah untuk mengevaluasi cara paling umum dalam melaksanakan latihan BSPS seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan. Target dan objek pemeriksaan menggabungkan cara paling umum untuk melakukan latihan dan eksekusi, penghibur secara bertahap, dan jumlah / sifat hasil. Memeriksa penghibur dilapisi oleh kekuatan. Pengecekan harus dimungkinkan secara langsung dan implikasi. Pengamatan langsung dibantu melalui uji pengambilan dengan tes yang ditentukan berdasarkan kebutuhan. Pengecekan adalah dengan implikasi yang dibawa keluar melalui aplikasi pengamatan Berdasarkan hasil wawancara bersama Tenaga Ahli Manajemen Muhammad Mukhlis beliau menyakan bahwa:

“pada saat proses pelaksanaanya kami sebagai supervisor dari Tim Ahli melakukan Pengendalian dan pemantauan agar pembangunanya sesuai dengan apa yang telah direncanakan hanya saja kendalanya masi kurangnya kasadaran akan keswadayaan dari penerima bantuan”. (28 Agustus 2023).

Senada dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama penerima bantuan Ibu Asi beliau menyatakan bahwa:

“Ada yang datang pantau, lagi proses kerja mereka datang foto selesai bagian pemasangan batako mereka foto juga habis itu selesai pemasangan jendela pintu di foto juga sampai selesai semuanya juga mereka foto”. (28 Agustus 2023).

Proses pemantauan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara suda berjalan dengan cuku baik terbukti dengan pernyataan salah satu penerima bantuan yang melihat langsung proses pemantaun pembangunan rumahnya sendiri.

2. Evaluasi

Setelah pemantauan atau pengendalian langkah selanjutnya yaitu evaluasi yang mana berfungsi agar mengetahui capaian kerja yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara bersamas Tenaga Ahli Manajemen Muhammad Mukhlis beliau menyatakan bahwa:

“Setelah selesai proses pembangunan secara fisik maka selain melakukan evaluasi mengenai kecukupan runag dan keselamatan bangunan kami juga melakukan peningkatan keswadayaan kepada penerima bantuan dengan memberikan edukasi

tentang bagaimana menjagah rumahnya dan menjadikan rumah tersebut terus bertumbuh”. (28 Agustus 2023).

KESIMPULAN

Manajemen Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Kecamatan Abeli pengelolaanya cukup optimal baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan hingga pengawasan atau pengendalian sudah berjalan dengan baik. Secara umum konsep pengelolaan program BSPS di buat oleh Dirjen Penyediaan Perumahan yang dijabarkan secara rinci dalam panduan teknis pelaksanaan program BSPS sedangkan Satker bertugas sebagai pelaksana, pengawas, hingga pendampingan penerima bantuan sehingga Satker dalam tugasnya selalu berpatokan pada ketentuan tersebut, akan tetapi masi ada kondisi-kondisi yang tak terduga dalam lingkungan masyarakat yang tidak dijabarkan dalam ketentuan tersebut seperti kenaikan harga bahan bangunan dan masi kurangnya kesadaran penerima bantuan untuk menswadayakan rumahnya.

REFERENSI

- Altadhy Pambuditama, B. P. (2023). Analisis Faktor Risiko Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2023 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–8.
- Azmalina, T. P., Ayuh, E. T., Mayasari, R. T., & Yuliani, H. (2023). Peran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dalam Mensosialisasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 67–73. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6167>
- Bangun, B. D. M., & Universitas Darma Agung, M. (2018). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. *Jurnal Prointegrita*, 6(3). <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2430>
- Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. In *Gramedia Pustaka Utama*. Gramedia Pustaka Utama.
- Edisusanto Roman Nama Drs. Teguh Santoso, M.Si Drs. Radjikan, M. S. (2023). Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Di Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur - Nusa Tenggara Timur. *Administrasi Negara Fakultas*, 3(01), 1–23.

- Jannah Hartin Miftahul, Erwan Sastrawan, H. W. A. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Siwalembu Kecamatan Sojol. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 2(2), 113–123. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jempper/article/view/1412>
- Jufri, M., Herlina, B., & Syamsiar. (2022). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. *Public Administration*, 3(2), 1136–1153.
- Kristanti, D., Charviandi, A., Juliawati, P., & Harto, B. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara* (Issue 1). Bumi Aksara.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=e2ppEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=manajemen+pengetahuan&ots=gV368HYlR3&sig=ugm1Twmq-r6Ya9ITLRHYA6ieJi0>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Edisi 3). SAGE.
- Mohammad Andi Aziz, Arief Bachtiar, K. A. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Gedangan Oleh Satker Penyediaan Perumahan Jawa IV. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(November), 645–652.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10130378>
- Muhammad, M. (2017). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN* (Nurmaya (ed.); Cetakan 1). CV. Dua Bersaudara.
- Putri Wulan Agustina, Kiky Asmara, A. B. (2023). Upaya Penanganan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(November), 559–567.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10081403>
- Salusu, J. (1996). *Strategi Organisasi Publik*. Amara Books.
- Samsudin, S. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*. CV. Pustaka Setia.
http://library.iainmataram.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16268
- Sari, R. N., Sutiyoso, B. U., & Ermawati, M. (2022). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Kasus: Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan*, 2(3), 201. <https://doi.org/10.35472/jppk.v2i3.760>
- Siska Nofitiana, Sishadiyati, W. P. P. (2023). Dampak Ekonomi Dan Sosial Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Karangpatihan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(November), 736–747.

<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10089011>

W.Griffin, R. (2020). *Pengantar Manajemen*. Mitra Cendekia.